

**ANALISIS FAKTOR DOMINAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
TAHUN 2014**

ARTIKEL



OLEH

REZI MERZA NELLA

56304/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Analisis Faktor Dominan Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2014

Oleh:

Rezi Merza Nella
56304/2010

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
September 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Juli 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, A
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Erly Mulyani, SE, M.Si. Ak
NIP. 19781204 200801 2 011

Analisis Faktor Dominan Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2014

Rezi Merza Nella

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : reziamore@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: faktor dominan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Agam. Jenis penelitian ini adalah penelitian *Confirmatory Faktor Analysis (CFA)*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Agam yang berjumlah 43 SKPD. Sampel ditentukan berdasarkan metode *simple random sampling*, sebanyak 39 SKPD di Pemerintah Kabupaten Agam. Pengumpulan data dengan kuesioner kepada responden yaitu 1 orang kepala bagian keuangan dan 2 orang staf akuntansi/keuangan pada setiap SKPD. Teknik analisis data yang digunakan analisis faktor dengan bantuan SPSS versi 20.0 *for windows*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah faktor ke satu Lingkungan Pengendalian sebesar 67.196%, faktor ke 2 adalah Penilaian Resiko sebesar 20.497%, faktor ke 3 adalah Aktivitas Pengendalian sebesar 7.432%, dan faktor ke 4 adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 4.874%.

Kata kunci: pengendalian intern pemerintah dan pemerintah daerah.

Absctract

This research purposed aims to determine the dominant factor in the implementation of the internal control system of government in Agam district. Type of this study is Confirmatory Factor Analysis (CFA) research. The research population are Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) in Agam, around 43 SKPD. The sample is selected based on method of simple random sampling, Around 39 SKPD in Agam. The data collection were done with questionnaire to respondances. They are accounting officer of SKPD. The analysis used the factor analysis SPSS version 20.0 for windows.

The results showed that: the dominant factors in the implementation of the internal control system of government are the first actor is the control environment in 67.196%, the second factor is risk assessment in 20 497%, the third factor is the control activity in 7,432% and the fourth factor is the information and communication in 4.874 %.

Key words: *internal control and government district*

1. PENDAHULUAN

Undang-undang dibidang keuangan negaramembawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah agar dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan instansi pemerintah dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya dengan efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan negara dapat dilaporkan secara andal, asset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut PP No.60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu suatu sistem pengendalian intern yang dapat diselenggarakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) juga dibutuhkan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan organisasinya. Pemerintah daerah melakukan pengendalian untuk

dapat memantau pelaksanaan kegiatan sehingga lebih menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan SPIP pada Pemerintah Daerah akan tercapai dengan di implementasikannya unsur-unsur dan sub unsur-sub unsur SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko, (3) Aktivitas Pengendalian, serta (4) Informasi dan Komunikasi, dan (5) Pemantauan

Selain itu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dapat berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah atau pimpinan wajib untuk dapat mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya. Laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, dan mengamankan aset negara, serta mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Penge-

cualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat lima opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TP), Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP), dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan.

Terkait atas masalah opini laporan keuangan tersebut, hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Agam dalam IHPS I 2013, BPK RI perwakilan Sumatera Barat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), itu berarti tidak ada peningkatan dari pemberian opini atas LKPD tahun 2008. Pada tahun 2012 opini audit LKPD Kabupaten Agam tetap Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penelitian mengenai pelaksanaan SPIP telah dapat membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kualitas laporan keuangan instansi pemerintah (dalam hal ini adalah LKPD), Wilopo (2006) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang: (1) terkait dengan catatan keuangan; (2) menyediakan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan penerimaan serta pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) menyediakan keyakinan yang memadai atas keamanan aset daerah yang berdampak material pada laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi lebih lanjut guna memberikan bukti empiris akan peran dan fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP No.60 Tahun 2008) dalam meminimalisasikan tingkat salah saji dalam pencatatan akuntansi keuangan

pemerintah daerah, dengan mengambil obyek penelitian pada pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro.

Kelemahan yang terdapat pada sistem pengendalian intern pemerintah daerah diduga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan hasil audit atas pelaksanaan pengendalian intern yang tersaji di buku II Laporan BPK dalam IHPS I tahun 2013 (<http://www.bpk.co.id>) secara jelas dapat memperlihatkan bahwa hampir seluruh daerah yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Agam mengalami permasalahan lemahnya sistem pengendalian intern yang terlihat dari masih banyaknya temuan-temuan audit yang diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk itu peneliti mengambil tempat penelitian di Pemerintah Kabupaten Agam, selain karena masih terbatasnya penelitian pada bidang pemerintahan khususnya di Kabupaten Agam dan juga disebabkan oleh karena Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Agam pada tahun 2012 masih belum juga mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut ini rekapitulasi perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Agam untuk tahun 2008-2012.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat menentukan factor-faktor dominan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Agam.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan serta memahami tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan juga dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi dunia pendidikan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dan juga dapat memberikan manfaat sebagai masukan untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

2. TELAAH LITERATUR

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian yang efisien tidak mengendalikan semua kegiatan dengan pertimbangan efisiensi, sehingga organisasi harus menentukan tujuannya dengan jelas dan dapat mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, dan mengelola risiko yang ada. Berdasarkan hasil analisa tersebut ditentukan pengendalian untuk meminimalkan risiko. Salah satu komponen sistem pengendalian intern versi (*The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission*) COSO adalah penilaian risiko, dimana dalam organisasi mengharuskan menetapkan tujuan baik tingkat organisasi secara keseluruhan maupun pada tingkat kegiatan dan mengidentifikasi risiko, dan menganalisis risiko, serta mengelola perubahan tersebut.

Dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengendalian diperlukan kondisi yang kondusif serta jalur informasi dan komunikasi yang baik serta adanya mekanisme untuk mengidentifikasi berkembangnya kebutuhan informasi. Dalam konsep COSO ini, organisasi diharuskan memiliki lingkungan yang baik, mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dan melakukan pemantauan secara terus menerus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan kumpulan-kumpulan dari bagian-bagian yang tidak dapat terpisah yang dijalankan oleh semua pihak yang ada di dalam organisasi tersebut sehingga tujuan yang ditetapkan bersama berjalan efektif dan efisien.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengertian sistem pengendalian intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 mengarahkan pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya SPIP, keempat tujuan tersebut sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang Efektif dan Efisien

- b. Laporan Keuangan yang dapat Diandalkan
- c. Pengamanan aset negara
- d. Ketaatan peraturan perundang-undangan

COSO dalam Arens, (2011:316) mengasumsi bahwa suatu entitas telah menetapkan sendiri tujuan dari aktivitas operasinya.

Namun COSO mengidentifikasi tiga tujuan utama dari entitas, antara lain:

- a. Keandalan laporan keuangan
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Unsur - Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1. Lingkungan Pengendalian

Suatu Lingkungan Pengendalian menempatkan kualitas dalam organisasi dan dapat berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat dalam suatu instansi mengenai pentingnya pengendalian, sehingga dalam konsep ini lingkungan pengendalian adalah pondasi dasar atau penentu irama bagi semua unsur dalam sistem pengendalian intern lainnya yang dapat menyediakan disiplin dan struktur.

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Lingkungan Pengendalian terdiri dari:

- a. Penegakan nilai integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif

Menurut Indra Bastian (2001:53), lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja atau satuan kerja yang dapat mempengaruhi

efektivitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan dari dewan komisaris, manajemen, pemilik dan pihak lain mengenai pentingnya pengendalian dan tekanannya pada unit kerja yang bersangkutan. Faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain:

- a. Filosofi manajemen dan gaya operasi
- b. Nilai integritas dan etika
- c. Komitmen terhadap kompetensi
- d. Dewan direktur atau komite audit
- e. Struktur organisasi
- f. Pemberian wewenang dan tanggungjawab
- g. Kebijakan dan pokok sumber daya manusia (SDM)

Sedangkan menurut Arens (2004) lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan arti penting bagi entitas yang bersangkutan. COSO dalam menerapkan unsur pengendalian intern, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya.

2. Penilaian Risiko

Semua organisasi atau instansi tanpa memperhatikan ukuran, struktur atau industri menghadapi risiko. Tidak hanya pimpinan yang bertanggung jawab atas penilaian risiko yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah, melainkan seluruh pegawai yang ada di dalamnya harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memantau kejadian yang akan menghambat pencapaian visi dan misi organisasi. Proses penilaian risiko berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 meliputi:

- a. Identifikasi risiko
- b. Analisis risiko

Berdasarkan PSAP No.69 tahun 2008 penilaian risiko suatu entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang mungkin terjadi dan secara negatif berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

Dalam Arens (2011:325) penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah identifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Sedangkan menurut Indra (2003:16) penaksiran risiko untuk tujuan laporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU).

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Aktivitas pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai.

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 Aktivitas pengendalian terdiri dari:

- a. Reviu atas kinerja pada instansi pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas asset
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Berdasarkan PSAP Nomor 69 (2008) aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian meliputi :

- a. Reviu kinerja
- b. Pengolahan informasi
- c. Pengendalian fisik
- d. Pemisahan tugas

Dalam Arens (2011) aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur, sebagai tambahan yang termasuk dalam empat komponen lain, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Aktivitas pengendalian meliputi: (1) pemisahan tugas yang memadai, (2) otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, (3) dokumentasi dan catatan yang memadai, (4) pengendalian fisik atas aset dan catatan-catatan, dan (5) pengecekan terhadap pekerjaan secara independen.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan

membantu pegawai dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, untuk dapat menciptakan komunikasi atas informasi menjadi efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus dapat memenuhi beberapa hal, yaitu:

- a. menyediakan dan memanfaatkan bentuk dan sarana komunikasi;
- b. mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

Sejalan dengan pendapat Agung (2008:87) informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi yang memungkinkan setiap orang dapat melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi dapat menghasilkan laporan atas hal-hal yang terkait dengan operasional, keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Sedangkan dalam Indra (2003:16) informasi dan komunikasi adalah transaksi yang dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji potensial asersi manajemen dalam laporan keuangan. Sistem akuntansi yang efektif dapat memberkan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau kejadian adalah sah, telah diotorisasi, dicatat, dinilai secara wajar, digolongkan secara wajar, telah dicatat dalam periode yang seharusnya, dan dimasukkan ke dalam buku pembantu serta diringkaskan dengan benar.

Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya membahas faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nory (2012). Dalam penelitian Nory tersebut menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian merupakan faktor tertinggi yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kota Padang. Dan Aktivitas Pengendalian merupakan faktor terendah mempengaruhi efektivitas

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kota Padang.

Selanjutnya penelitian yang pernah juga membahas faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kota Padang, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rumondang (2010). Pada penelitian Rumondang tersebut menunjukkan bahwa variabel lingkungan pengendalian adalah faktor terbesar yang mempengaruhi pelaksanaan sistem intern pemerintah Kota Padang. Dan faktor terendah adalah pemantauan, dimana faktor-faktor yang digunakan adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori diatas yang dapat dijelaskan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Lingkungan pengendalian sebagai dasar utama dalam faktor penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sehingga keberadaan bagi penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) di Indonesia. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen atau instansi

dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Suatu entitas memerlukan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan perusahaan atau instansi akan dicapai.

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, dan mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi telah disajikan dengan benar.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 1

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkonfirmasi hubungan-hubungan yang terdapat pada suatu permasalahan. Setelah dianalisa diharapkan hasilnya bisa menjadi hipotesa untuk penelitian berikutnya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Agam berjumlah 43 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Inspektorat.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *simple random sampling*, yaitu tiap unit populasi diberi nomor, kemudian sampel yang digunakan ditarik secara random, baik dengan menggunakan

random numbers ataupun dengan undian biasa.

Untuk menentukan berapa sampel yang diambil, digunakan rumus *slovin* (Husein, 2011:77) dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1 + N(\alpha)^2} \\ &= \frac{43}{1 + 43(0,05)^2} \\ &= 39\end{aligned}$$

Responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan dan 2 orang staf akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jumlah responden sebanyak 117 orang dari 39 SKPD yang terdapat di Ka-bupaten Agam, setiap SKPD terdiri dari tiga responden.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek merupakan jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut diperoleh secara langsung dari instansi pemerintah daerah dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner disebarkan langsung ke responden, demikian pula pengembalannya dijemput sendiri sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintah tersebut. Responden diharapkan mengembalikan kembali kuesioner pada peneliti dalam waktu yang telah ditentukan.

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju (SS), Se-tuju (S), Ragu-Ragu (RR), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Variabel yang di ukur dalam kuesioner: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi.

Uji Validitas dan Reliabilitas

1.Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan rumus korelasi *Product Moment*. jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka nomor item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2.Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya akan dilakukan pengujian reliabilitas, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Instrumen dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha* (α) dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 20.0. Umar (2005) menyatakan cara mengukur reliabilitas dengan *Cronbach Alpha's* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kurang dari 0.6 tidak reliabel
- b. 0.6-0.7 dapat diterima

- c. 0.7-0.8 baik
- d. Lebih dari 0.8 reliabel

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif
 - a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab lengkap oleh responden.
 - b. Menghitung Nilai Jawaban

Karena penelitian ini menggunakan data primer maka nilai jawaban dihitung menggunakan rumus:

Rata-Rata Skor

$$= \frac{(5 SS)+(4 S)+(3 KS)+(2 TS)+(1 STS)}{15}$$

Dimana:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- KS = Kurang Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS= Sangat Tidak Setuju

Menghitung nilai rerata jawaban responden menggunakan rumus :

$$\text{Mean} = \sum_{h=1}^n xi$$

Dimana :

- xi = Skor total
- n = Jumlah responden

Maka tingkat capaian responden (TCR) dihitung dengan:

$$\text{TCR} = \frac{\text{Rata-Rata Skor}}{5}$$

2. Analisis Faktor

Analisis faktor merupakan jenis analisis yang digunakan untuk mengenali

dimensi pokok atau keteraturan sebuah fenomena.

Analisis faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor konfirmatori (*confirmatory factor analysis*) yang di gunakan untuk menguji apakah indikator-indikator dapat mengkonfirmasi variabelnya. Dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori dapat ditentukan indikator variabel yang sebenarnya dan mengelompokkannya ke dalam faktor-faktor penelitian.

Analisis faktor dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$F_j = b_{j1}X_{s1} + b_{j2}X_2 + b_{jk}X_{sk}$$

Keterangan:

- Fj = skor faktor ke-j
- Bj = koefisien skor faktor ke-j
- Xsk = variabel ke-k yang telah distandardisasi

Langkah-langkah dalam melakukan analisis faktor sebagai berikut :

1. Menentukan variable apa saja yang akan dianalisis
2. Menguji variable - variabel yang ditentukan dengan menggunakan metode *bartlett's test of sphericity* serta pengukuran MSA (*measure of sampling adengency*).
3. Melakukan proses ini pada analisis faktor yaitu factoring atau menurunkan satu atau lebih faktor dari variabel yang telah lolos pada ujivariabel sebelumnya. Melakukan *factor rotatin* atau rotasi terhadap faktor yang telah dibentuk. Tujuan itu untuk memperjelas variable yang masuk akan kedalam faktor penentu.
4. Interpretasi atas faktor yang telah terbentuk, khususnya memberi nama atas faktor yang terbentuk tersebut yang dianggap bisa mewakili variabel anggotanya.

Beberapa konsep yang berhubungan dengan analisis faktor yaitu :

- a. Nilai Kaiser Meyer Olkin (KMO), adalah untuk menguji ketepatan analisis faktor yang dilakukan. Nilai yang berkisar antara 0,5 sama dengan 1 mengidentifikasi analisis faktor dapat dilanjutkan
- b. *Eigenvalue*, adalah nilai yang mewakili total varian yang dapat dijelaskan oleh setiap faktor.
- c. *Communality*, adalah jumlah varian yang dimiliki oleh semua variabel yang dianalisis dan sebagai proposi varian yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang terbentuk
- d. Faktor *loading*, adalah keeratan hubungan (korelasi) antara variabel-variabel yang ada dengan faktor-faktor yang nantinya terbentuk
- e. Faktor matrik, adalah memuat faktor loading dari seluruh variabel pada faktor yang telah terbentuk.

Definisi Operasional

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah salah satu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
2. Pada Lingkungan Pengendalian (LP) pimpinan instansi pemerintah wajib untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan suatu perilaku positif, penegakan integrasi dan nilai etika dalam pelaksanaan (SPIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko, dalam rangka untuk mencapai tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan atau melaksanakan aktivitas pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

5. Pimpinan instansi pemerintah wajib dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah tiga puluh sembilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Agam yang terdiri dari dinas, kantor, badan, dan inspektorat daerah. Setiap sampel masing-masing terdiri dari tiga responden. Dari tiga puluh sembilan sampel tersebut, disebarikan sebanyak 117 kuesioner. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuesioner yang diterima kembali sebanyak 99 kuesioner. Hanya 74.36% di antaranya yang mengembalikan dan mengisi kuesioner dengan lengkap. Kuesioner diantarkan langsung kepada masing-masing responden dan dijemput langsung dalam rentang waktu 17 April sampai 9 Mei 2014.

Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian data secara statistik dengan lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pendeskripsian terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti.

Tabel 1

Dari **Tabel 1** di atas diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 87 orang dari Kasubag keuangan dan staf akuntansi dari 39 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam. Untuk Lingkungan Pengendalian tersebut diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 70.34 dengan standar deviasi 5.689, nilai tertinggi 85.00 dan nilai terendah 54.00. Untuk variabel Penilaian Risiko memiliki nilai rata-rata sebesar 16.70 dengan standar deviasi 1.685, nilai tertinggi sebesar 20.00 dan nilai terendah sebesar 10.00. Untuk

variabel aktivitas pengendalian memiliki nilai rata-rata sebesar 49.70 dengan standar deviasi 4.349, nilai tertinggi sebesar 60.00 dan nilai terendah sebesar 41.00. Dan untuk variabel informasi dan komunikasi memiliki nilai rata-rata sebesar 16.29 dengan standar deviasi 2.322, nilai tertinggi sebesar 20.00 dan nilai terendah sebesar 10.00.

Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 87$, adalah 0,1765. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel X_1 dan X_2 di atas r_{tabel} , X_3 dibawah r_{tabel} serta X_4 di atas r_{tabel} . Jadi dapat dikatakan bahwa item pernyataan untuk variabel X_1 dan X_2 adalah valid, X_3 tidak valid serta X_4 adalah valid.

Tabel 2

Dari **Tabel 2** di atas dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Instrumen Lingkungan Pengendalian dapat di ketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0.187. Instrumen Penilaian Resiko nilai terkecil 0.617. Dan untuk Aktivitas Pengendalian nilai terkecil 0.281. Sedangkan untuk Informasi dan Komunikasi nilai terkecil 0.373.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana hasil penelitian tetap konsisten. Berikut ini merupakan tabel nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing instrumen:

Tabel 3

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada **tabel 3** di atas yaitu instrument variabel Lingkungan Pengendalian 0.857. Untuk instrument Penilaian Resiko 0.854. Untuk instrument

Aktivitas Pengendalian 0.837. Sedangkan instrumen Informasi dan Komunikasi 0.757. Dengan demikian semua instrument penelitian dapat dikatakan reliabel.

Analisis Faktor

1. Matriks Korelasi

Matriks korelasi digunakan untuk mengetahui apakah semua indikator yang akan digunakan memiliki korelasi yang erat diantara sesamanya dengan nilai *Keiser-Meyer-Meansure of Sampling Adequacy* atau KMO MSA.

Dari **Tabel 4** terlihat bahwa nilai *KMO MSA* sebesar 0.737 maka indikator ini dapat diproses lebih lanjut.

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan diantara setiap indikator dilihat pada tabel *Anti-Image Matrices*. Pada **Tabel 5** terlihat semua nilai KMO besar dari 0.50 yang berarti semua indikator memiliki korelasi yang erat dan dapat dilanjutkan ke dalam analisis berikutnya. Angka *KMO* and *bartlett's* berdasarkan **Tabel 4** diatas menunjukkan .737 dengan signifikansi 0.000 yang berarti KMO dan *bartlett's* tersebut memenuhi batas angka KMO and *bartlett's* 0.5 ($.737 > 0.5$) dan dan signifikan .000 yang berada jauh dibawah 0.5 ($.000 < 0.5$) yang dapat disimpulkan bahwa variabel dan sampel yang ada dapat dianalisis lebih lanjut. Angka pada *Anti Image Correlation* menunjukkan MSA yang berada diatas 0.5 yaitu untuk X_1 (lingkungan pengendalian) sebesar .705^a. Untuk X_2 (penilaian resiko) sebesar .783^a, X_3 (aktivitas pengendalian) sebesar .728^a, dan untuk X_4 (informasi dan komunikasi) sebesar .741^a. Hal ini menunjukkan variabel dan sampel yang ada dapat dinalisis lebih lanjut.

2. Communalities

Communalities merupakan jumlah varian yang dimiliki oleh semua variabel yang dianalisis atau sebagai proporsi yang dapat dijelaskan faktor-faktor umum. Semakin kecil *communalities* sebuah variabel akan semakin lemah hubungannya

dengan variabel yang terbentuk. Nilai *communalities* dapat dilihat pada **Tabel 6**.

3. Penentuan Jumlah Faktor

Penentuan jumlah faktor dapat didasarkan pada *eigenvalue* besar dari 1. *Eigenvalues* menunjukkan kepentingan relative masing-masing faktor dalam menghitung varian setiap variabel yang di analisis. Untuk menghitung varian ke empat variabel maka angka *eigenvalues* untuk ke empat variabel adalah sama dengan total ke empat variabel. Penentuan pembentukan faktor di dasarkan pada kriteria angka *eigenvalues* yang berada di bawah 1 tidak digunakan dalam menghitung jumlah faktor yang terbentuk. Adapun hasil *eigenvalues* dapat dilihat pada **Tabel 7**.

Analisis berikutnya adalah apakah faktor yang terbentuk memiliki korelasi antar variabel sudah tepat atau dengan cara melihat korelasi keenam faktor yang terbentuk. Hasil korelasi antara variabel dapat dilihat dari component matrix yang tersaji pada **Tabel 8**.

Pembahasan

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian (LP) merupakan faktor dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dimana persentase varian faktor lingkungan pengendalian adalah sebesar 67.196%.

Selain itu hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rumondang (2010) lingkungan pengendalian merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Karena Lingkungan Pengendalian yang menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian. Dalam Primastuti (2006) lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsure pengendalian yang membentuk sistem. Pada pemerintah daerah, kepala daerahlah

yang memiliki peranan paling penting dalam pembentukan suatu lingkungan pengendalian yang kondusif karena baik tidaknya suatu lingkungan pengendalian sangat tergantung dari gaya kepemimpinan seorang kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkannya untuk lingkungan kerjanya. Dengan terciptanya atau tercapainya lingkungan pengendalian yang baik maka diharapkan tiap personil dari pemerintah daerah mampu menjalani kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada sehingga sistem pengendalian intern pemerintah tetap efektif.

2. Penilaian Resiko

Faktor kedua dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah penilaian resiko, yang mempunyai nilai varian sebesar 20.497%.

Penilaian risiko entitas untuk dalam tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan yang andal juga berkaitan dengan peristiwa atau transaksi khusus. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang mungkin terjadi dan secara negatif berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Sekali risiko diidentifikasi, manajemen mempertimbangkan signifikan atau tidaknya, kemungkinan terjadinya, dan bagaimana hal itu dikelola.

Selain itu penelitian ini sejalan dengan penelitian Nuning (2012) Langkah awal dalam mengelola risiko dengan baik adalah melakukan *Risk Assessment* (identifikasi dan evaluasi risiko yang melekat pada organisasi) sehingga menghasilkan daftar pemetaan dan kuantitas risiko serta daftar respon risiko. Menurut Utoyo (2011) dalam Nuning,

untuk dapat meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi diperlukan adanya penyatuan Manajemen Risiko Terpadu (*Enterprise Risk Management/ERP*), Pengendalian Intern dan Pencegahan Kecurangan (*Fraud Deterrence*). Prinsip dasar pengendalian internal versi COSO adalah *good risk management and internal control are necessary for long term success of all organizations*.

3. Aktivitas Pengendalian

Faktor ketiga dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Agam adalah aktivitas pengendalian, yang mempunyai nilai varian sebesar 7.432%.

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu pimpinan meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi.

4. Informasi dan Komunikasi

Faktor keempat dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah (SPIP) Kabupaten Agam adalah Informasi dan Komunikasi yang mempunyai nilai varian adalah 4.874%.

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup system akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (termasuk peristiwa dan keadaan) dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem berdampak kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan semestinya dalam mengelola dan mengendalikan aktivitas entitas dan untuk menyusun laporan keuangan yang andal.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rumondang (2010) yang menyatakan bahwa suatu Informasi dan

komunikasi harus diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan komunikasi secara efektif dapat dilakukan dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

Selain itu Suatu organisasi juga membutuhkan jalinan komunikasi yang intensif antar komponennya dengan informasi yang berkualitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, dari empat faktor yang diteliti, faktor yang dominan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Agam adalah Lingkungan Pengendalian sebesar 67.196%.

Dari empat faktor yang diteliti, faktor yang paling kecil dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Agam adalah variabel Informasi dan Komunikasi sebesar 4.874%

Keterbatasan

Dalam pemilihan variabel pada pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) hanya terdiri dari empat variabel yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, serta informasi dan komunikasi. Hal ini memungkinkan terabainya faktor lain yang mungkin dapat mempunyai pengaruh lebih dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Dalam pelaksanaan (SPIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak hanya dari orang akuntansi saja tetapi juga ada dari hukum, ilmu sosial dan lain-lain. Tapi pada penelitian ini peneliti hanya meneliti jumlah responden atau sampel pada bagian akuntansi saja.

Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis

dalam bentuk kuesioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara.

Saran

Dari hasil penelilitan ini terlihat bahwa perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, jarang memberikan peringatan dini dan jarang meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Oleh karena itu, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah dapat ditingkatkan seefektif dan seefisien mungkin.

Dari hasil penelilitan ini terlihat identifikasi risiko, SKPD jarang menilai risiko signifikan yang mungkin terjadi dalam lingkup tugas Satuan Kinerja Perangkat Daerah dan menganalisis dampaknya terhadap pencapaian program kerja SKPD. Oleh karena itu, Pimpinan Instansi Pemerintah dapat mengidentifikasi setiap risiko yang melekat pada sifat misinya atau pada signifikan dan kompleksitas dari setiap program atau kegiatan spesifik yang dilaksanakan.

Dari hasil penelilitan ini terlihat pada item revidasi kinerja Instansi Pemerintah, SKPD jarang merevidasi kinerja SKPD secara berkala. Oleh karena itu, Pimpinan Instansi Pemerintah untuk dapat meningkatkan revidasi kinerja Instansi Pemerintah secara berkala.

Dari hasil penelilitan ini terlihat pada variabel Informasi dan Komunikasi, staf akuntansi SKPD jarang mengikuti pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, bagi setiap Pimpinan Instansi Pemerintah mewajibkan agar para staf akuntansi SKPD mengikuti pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik dan benar.

Bagi instansi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah

(SPIP) yang baik, dimana dalam keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dapat dikurangi sampai batas minimum.

Rata-Rata TCR pada penelitian ini sudah baik. Diharapkan pemerintah Kabupaten Agam dapat mempertahankan TCR tersebut. Namun masih ada nilai TCR yang reratanya masih rendah, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Agam dapat meningkatkan pencapaian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A. 2011. *Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Terpadu*. Terjemahan Desti Fitriani. Jakarta: Salemba Empat
- Arens, Alvin A, Randal J, Beasley, dan Mark S. 2004. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi*, Edisi Sembilan. Jakarta: PT. Indeks IKAPI
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- . 2006. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pemeriksaan Keuangan RI. 2013. “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2013”. Melalui <http://www.bpk.go.id> [04/10/2013]
- Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah RI. 2007. Pengantar Sistem Pengendalian Manajemen. Melalui <http://www.bpk.go.id> [10/10/2013]
- Guy, dan M. 2002. *Auditing Edisi 5 jilid 1*. Jakarta: Erlangga
- Griffin dan Eber. 2009. *Modul Lingkungan Pengendalian BPKP*.
- Nuning, Hindriani. 2012. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah. (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). Vol. 15, No.3
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Idris. 2008. *Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif dengan Program SPSS*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- I Gusti Agung, Rai. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Imam, Ghozali. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Indra, Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- . 2003. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Pusat Studi Akuntansi
- Marbunwis. 2010. Mengenal Pengendalian Intern Pemerintah Menurut COSO. Artikel. Diakses melalui www.google.co.id pada tanggal 26 Mei 2014
- Mudrajat, Kuncoro. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- . 2004. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nory. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [10/10/2013]
- . Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Melalui <http://www.google.com> [08/10/2013]

———— Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah.
Melalui <http://www.google.com>
[10/10/2013]

———— Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelola Keuangan
Daerah. Melalui
<http://www.google.com>
[10/10/2013]

———— Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah. Melalui
<http://www.google.com>
[08/10/2013]

———— Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Melalui
<http://www.google.com>
[08/10/2013]

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2008 tentang
Pertimbangan atas Pengendalian
Intern dalam Audit Laporan
Keuangan. Melalui
<http://www.google.com>
[15/12/2013]

Primastuti, Anindita. 2006. Kualitas
Sistem Pengendalian Intern Sebagai
Penentu Tingkat Kepercayaan
Laporan Keuangan Suatu
Pemerintah Daerah. *Jurnal*. IPDN

Ridwan. 2010. *Metode dan Teknik
Menyusun Tesis*. Bandung:
Alfabeta.

Rumondang. 2010. Analisis Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern (SPIP)
pada Pemerintah Kota Padang.
Skripsi. Fakultas Ekonomi
Universitas negeri Padang.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian
Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Umar, Sekaran. 2005. *Metedologi
Penelitian Bisnis*. Jakarta:
Salemba Empat

Wilopo. 2006. *Analisis Faktor-Faktor
yang Berpengaruh terhadap
Kecenderungan Kecurangan
Akuntansi* : Studi pada Perusahaan
Publik dan Badan Usaha Milik
Negara di Indonesia. Simposium
Nasional Akuntansi 9 Padang.

Gambar 1 Kerangka Konseptual

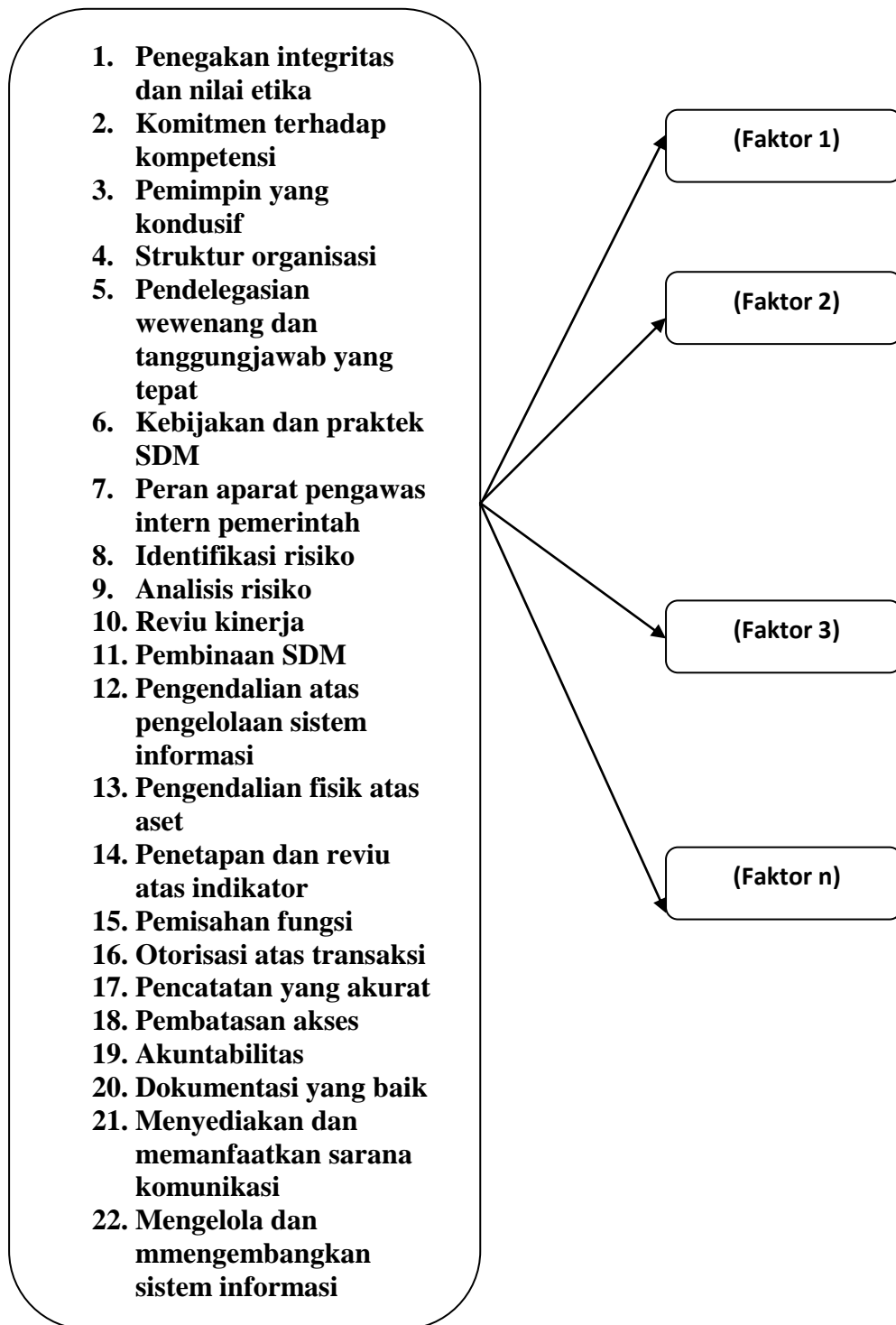


Table 1 Stasistik Deskriptif**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Lingkungan Pengendalian	87	54	85	70.34	5.689
Penilaian Resiko	87	10	20	16.70	1.685
Kegiatan Pengendalian	87	41	60	49.70	4.349
Informasi dan Komunikasi	87	10	20	16.29	2.322
Valid N (listwise)	87				

Tabel 2 Uji Validitas**Nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil**

Instrumen Variabel	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil
Lingkungan Pengendalian	0.187
Penilaian Resiko	0.617
Aktivitas Pengendalian	0.281
Informasi dan Komunikasi	0.373

Tabel 3 Uji Reliabilitas**Nilai *Cronbach's Alpha***

Instrumen Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>
Lingkungan Pengendalian	0.857
Penilaian Resiko	0.854
Aktivitas Pengendalian	0.837
Informasi dan Komunikasi	0.757

Tabel 4 Uji KMO***KMO and Bartlett's Test***

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.737
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	172.514
	df	6
	Sig.	.000

Tabel 5 Anti-Image Matrices
Anti-Image Matrices

		Lingkungan Pengendalian	Penilaian Resiko	Kegiatan Pengendalian	Informasi dan komunikasi
Anti-image Covariance	Lingkungan Pengendalian	.286	-.147	-.189	-.071
	Penilaian Resiko	-.147	.377	-.079	-.163
	Kegiatan Pengendalian	-.189	-.079	.382	.093
	Informasi dan komunikasi	-.071	-.163	.093	.760
Anti-image Correlation	Lingkungan Pengendalian	.705 ^a	-.448	-.573	-.153
	Penilaian Resiko	-.448	.783 ^a	-.207	-.304
	Kegiatan Pengendalian	-.573	-.207	.728 ^a	.173
	Informasi dan komunikasi	-.153	-.304	.173	.741 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Tabel 6 Communalities
Communalities

	Initial	Extraction
Lingkungan Pengendalian	1.000	.845
Penilaian Resiko	1.000	.802
Kegiatan Pengendalian	1.000	.714
Informasi dan komunikasi	1.000	.327

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tabel 7 Total Variance Explained
Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.688	67.196	67.196
2	.820	20.497	87.694
3	.297	7.432	95.126
4	.195	4.874	100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis

Tabel 8 Component Matrix^a

Component Matrix^a

	Component
	1
Lingkungan Pengendalian	.919
Penilaian Resiko	.895
Kegiatan Pengendalian	.845
Informasi dan komunikasi	.572

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.